

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang terjadi di Indonesia memberikan pengaruh untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu hal yang dapat dilihat secara nyata pasca reformasi adalah dilakukannya perubahan tata cara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada), baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Perubahan tersebut terasa sangat drastis jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Reformasi ini beberapa diantaranya telah menggeser struktur politik Orde Baru yang otoriter dan digantikan dengan struktur politik yang lebih demokratis. Pemilu yang pada masa Orde Baru hanya menjadi ‘ritual’ demokrasi tanpa makna, kini telah menjadi bagian penting demokrasi.

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung tersebut telah melahirkan demokrasi di tingkat lokal. Dalam hal ini, rakyat dapat memilih langsung wakil-wakilnya untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah yang akan merepresentasikan kepentingan mereka. Seperti kenyataan yang dapat kita lihat, bahwa dewasa ini masyarakat Indonesia telah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk ikut berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di negaranya. Salah satunya dapat dilihat dari adanya keikutsertaan seorang warga negara dalam menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka, maupun keikutsertaannya dalam menentukan isi suatu kebijakan yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini partai politik tentunya memiliki peranan yang penting, yaitu sebagai perantara bagi kepentingan rakyat dengan

pemerintah. Partai politik hendaknya mampu menyampaikan dengan baik aspirasi rakyat yang ditujukan kepada pemerintah dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Isharyanto (2017: 101):

Partai politik (parpol) merupakan suatu institusi yang sangat penting dalam ilmu demokrasi modern yang mengandaikan sistem keterwakilan (representatif). Keberadaan dan kinerjanya merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Partai politik akan mempengaruhi dan bagaimana dan kearah mana pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, dinegara-negara maju, ukuran keberhasilan demokrasi secara tepat bisa dilihat dari bagaimana partai politik menjalankan fungsinya untuk memasukan agenda-agenda kebijakan publik yang bermanfaat tidak saja bagi konstituen pemilihnya melainkan juga bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa yang ada. Maka bisa dikatakan, parpol adalah institusi inti demokrasi.

Perubahan dalam perpolitikan Indonesia sejak jatuhnya rezim Orde Baru telah memberikan ruang demokrasi yang sesungguhnya. Hal ini ditandai dengan lahirnya era reformasi. Indonesia menjadi negara yang mulai menghargai hak-hak warga negaranya terutama dalam menentukan wakilnya di DPRD dan DPR serta pemimpinnya. Reformasi politik telah membawa Indonesia menjadi negara dengan sistem politik yang demokratis, setiap partai politik memiliki kebebasan yang sama dalam berpartisipasi, berkompetisi untuk mempengaruhi, dan bahkan berebut kekuasaan (Muslim, 2013:24). Perubahan sistem kepartaian di Indonesia menjadi sistem multi-partai merupakan salah satu langkah untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik, hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Kepartaian.

Di samping itu, perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi baik tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan Presiden dan wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah, serta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik untuk tingkat II, I dan Pusat yang dipilih secara langsung dan tidak lagi dilakukan melalui pemilihan di DPRD dan DPR. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung tersebut merupakan konsekuensi terhadap perubahan dalam tatanan kenegaraan di Indonesia akibat adanya amandemen UUD 1945 (Sahya Anggara, 2013: 72).

Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum (Ramlan Surbakti, 2007: 116-117). Menurut J. Kristiadi sebagaimana dikutip oleh Hafied Cangara (2011: 215) partai politik yang seharusnya dapat dijadikan instrumen untuk menilai calon yang paling baik bagi masyarakat, cenderung lebih mementingkan calon-calon yang loyal kepada atasan daripada calon di luar partai politik yang memungkinkan dianggap masyarakat lebih berkualitas dan pantas menjadi kepala daerah. Apabila orang-orang yang menguasai lembaga tersebut tidak pernah peduli kepada pemegang sejati kedaulatan rakyat, yaitu rakyat itu sendiri, maka partai politik yang pada dasarnya sebagian besar feodalistik dan pragmatis akan semakin kehilangan roh dan relevansinya bagi perkembangan demokrasi.

Lahirnya pemilihan umum kepala daerah secara langsung di latar belakang oleh berbagai ketidakpuasan dan penyimpangan didalam proses pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan para wakil rakyat di daerah. Pemilihan umum kepala daerah benar-benar di akomodasikan setelah lahir Undang-Undang No. 32 Tahun 2017 tentang pemerintahan daerah disusul dengan keluarnya peraturan Perundang-

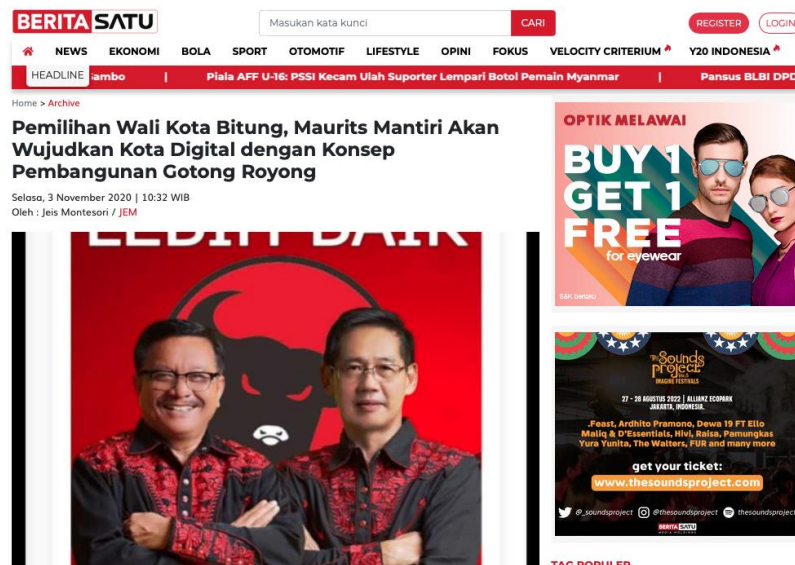
Undang-Undang No. 6 tahun 2017 adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Berdasarkan UUD 1945 seperti yang telah diamanatkan pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dimana kehendak rakyat akan diwujudkan secara langsung dengan memilih pemimpinnya pada tingkat provinsi yaitu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan pada tingkat kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.

Kegiatan komunikasi politik yang paling semarak dan melibatkan banyak orang adalah kampanye politik. Kegiatan ini dilakukan menjelang pemilihan, terutama pemilihan anggota legislatif (parlemen), pemilihan presiden, gubernur, bupati maupun walikota. Pesta demokrasi yang telah terselenggara dengan baik. Kegiatan kampanye merupakan bagian dari proses pemilu yang dilakukan masing-masing caleg untuk memasarkan visi, misinya kepada pemilih.

Calon Wali Kota Bitung, Sulawesi Utara, Maurits Mantiri berniat mewujudkan Bitung selaku "kota digital" dengan konsep pembangunan gotong royong yang berbasis di kelurahan. Selaku kota digital, warga Bitung, kata Maurits, hendak bisa menikmati segala pelayanan pemerintahan yang berbasis digital ataupun online sampai pada tingkatan kelurahan.

Maurits yang mengusung tag line kampanye "Lebih Baik", melaporkan, program awal yang hendak diwujudkannya bila terpilih selaku pemimpin wilayah merupakan, sediakan 1.000 titik wifi di Bitung, diiringi pembagian sarana hp (HP) Android kepada warga. Fasilitas telekomunikasi vital tersebut, kata Maurits, supaya warga gampang mengakses segala data tercantum penuh aktivitas belajar secara daring yang saat ini sudah jadi kebutuhan utama di masa digitalisasi. Maurits

Mantiri maju pemilihan wali kota Bitung di Pilkada Serentak 2020, berpasangan dengan Hengky Honandar ataupun diketahui dengan pendamping MM- HH. Pasangan calon favorit ini diusung koalisi PDIP, Gerindra, serta Perindo dengan total 10 dari 30 kursi yang terdapat di DPRD Kota Bitung. (<https://www.beritasatu.com/nasional/694111/pemilihan-wali-kota-bitung-maurits-mantiri-akan-wujudkan-kota-digital-dengan-konsep-pembangunan-gotong-royong>) diakses tanggal 03 November 2021 pukul 01.25 WIB.



Gambar 1.1. Berita Tentang Kampanye Calon Walikota

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bitung, secara formal menetapkan pasangan calon terpilih Maurits Mantiri–Hengky Honandar selaku Walikota serta Wakil Walikota Bitung terpilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Penetapan tersebut diselenggarakan oleh KPU Kota Bitung, di lantai 8 salah satu hotel di wilayah Kecamatan Maesa– Kota Bitung. Kamis 21 Januari 2021. Pimpinan KPU Bitung, Deslie Sumampouw di temui oleh beberapa awak media lobby hotel, usai penetapan dilaksanakan menarangkan bawah yang sudah termuat dalam novel Register Masalah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Makama Konstitusi.“

Penerapan ini cocok dengan keputusan KPU Bitung No: 01/ PL. 02. 7- Kpt/ 7172/ Kota/ 1/ 2021 tentang penetapan pasangan calon Walikota serta Wakil Walikota Bitung terpilih pada pemilihan tahun 2020. (<https://www.manadotoday.co.id/bitung/kpu-bitung-tetapkan-maurits-hengky-sebagai-walikota-dan-wakil-walikota-terpilih/>) diakses pada tanggal 03 November 2021 pukul 01.32 WIB.

Maurits-Hengky memperoleh 67.308 suara. Sementara paslon nomor urut 1, Jonas Lomban-Martin Daniel Tumbelaka, mendapatkan 37.770 suara dan paslon nomor urut 2, Victorine AO Lengkong-Gunawan Pontoh, memperoleh 8.831 suara (<https://news.detik.com/berita/d-5296921/sah-maurits-mantiri-hengky-honandar-menangkan-pilkada-bitung-sulut>) diakses pada tanggal 03 November 2021 pukul 01.32 WIB.



Gambar 1.2. Berita Kemenangan Maurits-Hengky Honandar

Pemilihan umum kali ini sedikit berbeda sebab dilaksanakan ditengah – tengah pandemic covid-19. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi peserta dan penyelenggara pemilu, namun menurut ketua KPU Desly Sumampow partisipasi

publik dalam pemilu kali ini mengalami peningkatan, pemilu legislatif pada tahun 2019 yang lalu mencapai 77,5 Persen, dan Pilkada tahun 2020 mencapai 81,23 Persen artinya ada kenaikan sebanyak 5 Persen. Angka tersebut tentu seiring sejalan dengan upaya komunikasi politik yang dibangun oleh pasangan calon masing – masing terutama maurts – hengky, permasalahan penggunaan protocol kesehatan menjadi konsentrasi penuh pasangan maurits-hengky hal ini di ungkap ketua tim pemenangan Fabian Kaloh, dikarenakan keterbatasan tersebut pasangan maurits – hengky kemudian memaksimalkan penggunaan media digital sebagai sarana kampanye, penyampaian aspirasi politik, serta komunikasi yang dilakukan secara massif dengan pendukung dan calon pemilih. Sementara paslon pesaing terberat pasangan MM – HH yang juga petahana Maximilan Jonas Lomban dan Martin Tumbelaka masih menggunakan cara lama dengan tatap muka langsung yang kemudian menyebabkan terjadi pelanggaran pemilu dikarenakan ada penumpukan massa yang jauh dari mematuhi protocol kesehatan.

Hal inilah yang kemudian menarik bagi penulis untuk mengungkapkan strategi komunikasi politik Maurits – hengky pada pilkada tahun 2020, bahwa kejadian pilkada kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya, dikarenakan kondisi pandemic covid – 19 yang mengubah dalam hal strategi maupun metode pendekatan komunikasi dengan konstituen, selain itu kondisi kota bitung yang majemuk dimana masing – masing organisasi keagamaan, adat dan serta organisasi kemasyarakatan lainya masing – masing memiliki konsolidasi identitas yang kuat di masing – masing kelompok menjadi tantangan tersendiri masing – masing

pasangan calon. Untuk itu pendekatan komunikasi politiknya pasti berbeda dan beragam.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yaitu :

1. Perubahan tata cara pemilukada pasca reformasi.
2. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk ikut berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di negaranya.
3. Lahirnya pemilukada secara langsung di latar belakang oleh berbagai ketidakpuasan dan penyimpangan didalam proses pemilukada.
4. Pemilukada 2020 berlangsung dalam masa pandemi covid-19
5. Marketing Politik Maurits Mantiri dan Hengky Honandar pada Pemilihan Walikota Bitung Tahun 2020

C. Pembatasan Masalah

Karena komunikasi politik merupakan suatu kajian studi yang sangat luas, maka peneliti membatasinya pada Marketing Politik Maurits Mantiri dan Hengky Honandar pada Pemilihan Walikota Bitung Tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:
Bagaimana “Marketing Politik Maurits Mantiri dan Hengky Honandar pada Pemilihan Walikota Bitung Tahun 2020”.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul “Marketing Politik Maurits Mantiri dan Hengky Honandar pada Pemilihan Walikota Bitung Tahun 2020.” sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan *Pull Strategy* dalam komunikasi politik pasangan calon Maurits Mantiri dan Hengky Honandar
2. Mendeskripsikan Analisis STP (Segmenting, Targeting, Positioning) dalam komunikasi politik pasangan calon Maurits Mantiri dan Hengky Honandar
3. Mendeskripsikan efektifitas media yang digunakan dalam komunikasi politik pasangan calon Maurits Mantiri, MM dan Hengky Honandar

b. Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan politik yang berkaitan dengan Strategi Komunikasi Politik pasangan calon IMaurits Mantiri dan Hengky Honandar pada Pemilihan Walikota Bitung Tahun 2020 khususnya masyarakat kota Bitung dan umumnya para pembaca penelitian ini.

b) Untuk memperoleh informasi mendalam tentang Strategi Komunikasi Politik saat pandemic covid-19 pasangan calon Ir. Maurits Mantiri, MM dan Hengky Honandar pada Pemilihan Walikota Bitung Tahun 2020.

b. Secara Praktis

Memberikan kontribusi mengenai data dan informasi yang dapat membantu penelitian lebih lanjut bagi peneliti-peneliti lainnya terutama mengenai bagaimana Strategi Komunikasi Politik Ir. Maurits Mantiri, MM dan Hengky Honandar pada Pemilihan Walikota Bitung Tahun 2020.

a) Sebagai kajian ilmiah bagi penulis selaku insan akademis dalam melaksanakan penelitian.

b) Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan referensi bagi para pegiat politik praktis sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pemenangan yang lebih baik, matang dan profesional guna meningkatkan kualitas dinamika perpolitikan di Indonesia